

## MOTIF DAN ORIENTASI POLITIK GENERASI MILENIAL PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Ferra Martian<sup>1</sup>, Ahmad Nada K.<sup>2</sup> Atie Rachmiate<sup>3</sup>  
Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Jalan Purnawarman No. 59, 40117, Kota Bandung,  
Indonesia, (022) 4203368  
fmartian20@gmail.com

---

### ABSTRAK

Generasi milenial dianggap apatis untuk berkiprah dalam dunia politik. Namun terdapat partai yang mewadahi sekelompok anak muda yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motif dan orientasi politik generasi milenial dari PSI. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif politik mereka dianggap sebagai kewajiban mendasar dan kebutuhan integral dalam kehidupannya. Anti korupsi dan anti intoleransi merupakan salah satu motif yang memotivasi mereka untuk terlibat dalam politik praktis dengan gaya baru milenial. Lima tahun PSI berdiri, membuat mereka yakin bahwa milenial saat ini mampu mendobrak antitesa dan pakem-pakem lama dari generasi sebelumnya (*baby boomer generation*). Politisi dari generasi milenial ini memegang teguh ideologi Pancasila dengan asas nasionalis, yang memiliki nilai dasar perjuangan kebajikan, keragaman, keterbukaan, dan meritokrasi.

**Kata Kunci:** Motif Politik, Orientasi Politik, Politisi Milenial

### *MOTIVES AND POLITICAL ORIENTATION OF MILENIAL GENERATIONS INDONESIA SOLIDARITY PARTY*

#### *ABSTRACT*

*Millennials generation are considered apathetic to take part in the political world. But there is a party that houses a group of young people, Indonesian Solidarity Party (PSI). This study aims to examine the motives and political orientation of the millennial generation of the PSI. The research method uses a qualitative approach with the study of phenomenology. Data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The results showed that their political motives were considered as fundamental obligations and integral needs in their lives. Anti-corruption and anti-intolerance is one of the motives that motivates them to get involved in practical politics with a new millennial style. Five years PSI was established, making them believe that millennials are currently able to break the old antithesis and standards of the previous generation (baby boomer generation). Politicians from this millennial generation uphold the Pancasila ideology with the nationalist principle, which has the basic values of the struggle for virtue, diversity, openness, and meritocracy.*

**Keywords:** *Political Motives, Political Orientation, Millennial Politicians.*

## PENDAHULUAN

Generasi milenial menentukan wajah bangsa ke depan. Kehadiran milenial dalam kontestasi politik begitu diperhitungkan. Motif yang dimiliki tentu beragam, namun pada umumnya mereka hadir untuk menyuarakan aspirasi dan sebagai agen perubahan.

*The motives leading individuals to select and relay content can be clustered into two groups: on the one hand, those that have to do with psychological factors, and on the other, those that refer to the features of the content itself* (Cappella et al., 2015).

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terdapat 63 juta milenial, atau penduduk usia 20-35 tahun (Indonesia Millennial Report, 2019). Periode usia milenial dimulai dari periode 20 tahun. Besarnya jumlah penduduk milenial saat ini dapat menjadi sebuah tantangan ataupun peluang, terutama bagi target Indonesia yaitu menembus status negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 dan menaikkan standar bagi masyarakat Indonesia. Kuncinya adalah dengan memahami orientasi politik milenial serta mendorongnya agar menjadi roda penggerak, di antaranya menjadi penggerak perubahan dalam bidang politik (Charles, 2001)

Berdasarkan riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dari data DCS KPU, sebanyak 21 persen atau 930 calon legislatif (caleg) berusia 21-35 tahun, sebanyak 68 persen atau 3.013 caleg berusia 36-59 tahun. Sedangkan caleg berusia 60 tahun ke atas jumlahnya sedikit, yakni 11 persen atau 499 caleg. Dari ketiga rentang usia, persentase caleg usia produktif terhitung lebih banyak dibandingkan usia milenial. Namun, hal ini merupakan sebuah kabar baik dan dianggap angin segar dalam panggung kontestasi politik Indonesia (Karus, 2019).

Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang relatif baru menempati posisi terbanyak generasi milenial anggotanya yang merupakan partai politik berhaluan tengah di Indonesia. PSI didirikan tahun 2014 diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natalie. PSI cenderung beranggotakan anak muda, perempuan, dan lintas agama. Komponen yang khas disuarakan adalah terkait antikorupsi dan anti-intoleransi. Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial secara aktif untuk mengajak warga muda berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Politisi PSI membawa *platform* tentang solidaritas, pluralitas beragama, suku, dan bangsa. Politisi PSI mengklaim akan mengisi tokoh-tokoh partai dengan anak muda dan tidak ingin adanya “mantan” politisi partai lain yang memasuki partai ini. Terdapat aturan bahwa pengurus partai dibatasi maksimal berusia 45 tahun, dan saat ini pengurus daerah rata-rata berumur 20-30 tahun. Selain itu, politisi PSI tidak mau bertumpu kepada seorang tokoh untuk mengangkat nama partai, seperti partai politik yang ada selama ini. PSI mengklaim memiliki sistem untuk menunjang transparansi sumbangan finansial, khususnya memisahkan pengaruh bisnis dan operasional partai. PSI menjadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.

PSI dianggap sebagai angin segar dalam kontestasi politisi milenial di Indonesia. PSI mencoba membawa perubahan kondisi politik, khususnya bagi anak-anak muda yang sudah tidak percaya pada partai lama. Milenial dan perempuan dianggap PSI selama ini kurang terwakili kepentingannya di dunia politik. Terlebih milenial dan perempuan pada umumnya tidak banyak yang melek politik (Kompas.com, PSI, “Grace Natalie dan Citra Partai Anak Muda”, 22 Februari 2018). Hal ini juga ditunjang oleh sebuah

fakta bahwa penguasaan medan pertarungan para caleg perempuan, menurut pengamat politik, relatif rendah sehingga tingkat keterpilihan mereka di parlemen kerap tidak pernah mencapai harapan minimal 30%. (BBC Indonesia, 1 April 2019).

Menurut hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dalam IDN *Research Institute* 2019 dalam riset tersebut, berita politik di Indonesia dianggap hal yang berat karena mereka tidak terbiasa akan terpaan berita demikian. Milenial justru lebih senang dengan berita-berita ringan seputar *lifestyle* atau hiburan. Lembaga *Pew Research Center* menjelaskan di era generasi milenial ini, berbagai peristiwa sering meninggalkan kesan mendalam pada generasi milenial juga mengembangkan pola pikir. Generasi milenial dinilai lebih peka dalam menyikapi suatu hal, namun sayangnya terkadang tergesa-gesa dalam memustuskan sebuah perkara. (Taylor, Paul Keeter, Scott, 2010). Atas dasar hal inilah politisi PSI memiliki kesadaran untuk ‘*mendobrak*’ pakem-pakem komunikasi politik yang lama, yang dianggap tidak efektif dalam menampung aspirasi milenial. Agar milenial menyadari bahwa politik merupakan hal yang integral dalam kehidupan.

Komunikasi politik menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, komunikasi politik ibarat darah yang mengalir. Aliran darah tersebut diibaratkan para politisi (komunikator). Ketika aliran darah itu mati, maka komunikasi politik dianggap tidak berjalan dengan baik. Nimmo melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif yang mengatur hajat hidup dalam tatanan yang kompleks yaitu negara. Bila orang mengamati konflik dalam ranah politik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi (Nimmo, 1989).

Komunikasi politik adalah komunikasi yang disengaja oleh aktor politikus untuk menyampaikan pesan politik guna mencapai tujuan komunikasi dalam arti menghasilkan efek komunikasi, maka negara dalam hal ini sebagai aktor utama tidak hanya dalam proses ekonomi tetapi juga proses politik, perlu memiliki desain besar komunikasi politik yang benar-benar efektif. Itu termasuk perumusan pesan dan pemilihan media

yang sesuai untuk setiap audiens yang dituju. (Dewi dalam Jurnal *MediaTor*, Vol 10 (2), Desember 2017, p. 137)

Kecenderungan milenial saat ini terhadap isu politik terkadang hanya sebatas mengajukan aspirasi dengan mengikuti demo-demo hingga orasi. Ada pula yang menjadi *volunteer*, aktivis, dan menyuarakan aspirasi melalui media sosial. Pendekatan politik kaum milenial pada umumnya menggunakan pendekatan pragmatis. Pencarian mereka untuk solusi mungkin hanyalah penangkal untuk keberpihakan yang intens dalam politik saat ini. Di sisi lain, kesediaan kaum milenial untuk berpindah antar lembaga berdasarkan apa yang dianggap paling efisien. Jenis komitmen yang dimiliki seharusnya adalah komitmen jangka panjang dan kolektif yang diperlukan dengan tindakan demokratis dalam penyelesaian masalah. Kendala utama yang harus diatasi oleh para pembuat kebijakan bukan hanya kaum milenial, tetapi berlaku untuk badan politik: fungsi dan kepercayaan lembaga-lembaga demokrasi negara. Jadi, ketika para pembuat kebijakan mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan generasi milenial yang dianggap lebih *advance* (Gilman, Elizabeth, (2014).

Rendahnya ketertarikan milenial terhadap isu-isu politik tidak lepas dari

stigma yang dimiliki. Meskipun begitu, tingkat kesadaran milenial dan partai yang diketahuinya berbeda terhadap masing-masing partai. Adapun persentase partai politik yang paling dikenal di antaranya PDI Perjuangan (93,9 persen), Partai Golkar (93,9 persen), Partai Gerindra (91 persen). Sedangkan, partai yang kurang begitu dikenal oleh milenial adalah Partai Berkarya (16,2 persen), PKPI (15,4 persen), dan Partai Garuda (2,3 persen). Tingkat *awareness* tersebut belum tentu sama dengan nilai keterpilihan (elektabilitas) partai politik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran merupakan gerbang awal untuk melihat potensi raihan elektoral partai politik. Dengan semakin terasa kontestasi pemilu 2019, partai politik khususnya kandidat milenial dengan tingkat kesadaran yang rendah harus lebih agresif untuk menjalin komunikasi kepada milenial (Indonesia Millennial Report, 2019). Melihat kondisi interaksi antara generasi milenial dengan politik yang tidak telalu “sehat”, perlu dikaji bagaimana motif dan orientasi para politisi milenial yang selama ini aktif dalam partai politik.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan studi fenomenologi dengan teori dari Alfred Schutz melalui proses tipikasi berdasarkan

kesamaan tujuan yang menjadi sebuah alat klasifikasi untuk menempatkan fenomena ke dalam tipe-tipe khusus. Konsep fenomenologi Schutz bertolak pada makna tindakan yang dikembangkan oleh Weber. Ketika Weber menggunakan istilah “*motive*” ini berarti bahwa kalimat (a) “*in-order-to*” dari sebuah aksi atau tindakan, orientasi dari tindakan tersebut terhadap kejadian di masa depan, namun menurut Alfred Schutz sebelum masuk pada tahapan “*in-order-to*”, terlebih dahulu ada tahapan (b) “*because*” dari setiap aksi, adalah telah terjadi di masa lampau (Kuswarno, 2009).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Dalam pemilihan subjek penelitian peneliti menggunakan *purposive sampling*. Informan berasal dari PSI dengan rentang usia 20 – 40 tahun. Selain itu, informan merupakan anggota DPRD Daerah Pemilihan Bandung I dan Ketua DPP PSI Jakarta dan menjadi bagian dari struktur dan aktif dalam partisipasi politik semenjak PSI dibentuk. Berikut merupakan nama-nama informan dalam penelitian ini; 1) Sumardy Ma, MM. Ketua DPP PSI, CEO Buzz&Co. 2) Yoel Yosaphat, S.T. Anggota DPRD Kota Bandung 2019-2024, dan 3) Ariyo Bimmo, S.H., LL.M. Kandidat Legislatif DPR-RI Dapil Jawa Barat 1,

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Aktivis Reformasi Peradilan

Alasan peneliti memilih rentang usia 20 – 40 tahun, berdasarkan sumber Badan Pusat Statistika mengenai statistik gender tematik merujuk pada pendapat How & Strauss, 2000, Martin & Tulgan, 2002, dan Oblinger & Oblinger, 2005 milenial atau *Generation X* adalah berusia 20 – 40 tahun dengan menuliskan tahun 1980 – 2000, 1980 – 1999, dan 1980 - 1995. (Budiati, et al, 2018). Begitu pula meninjau keanggotaan PSI yang memiliki kriteria usia 20 – 40 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Motif Politik Politisi Milenial

Partai ini memiliki 2 (dua) landasan *platform* yang diperjuangkan yaitu antikorupsi dan anti intoleransi.<sup>1</sup> Maraknya korupsi di Indonesia yang telah menjadi budaya, politisi PSI bersuara perihal anggaran. Kerap kali politisi PSI mendapat kritikan dari partai lainnya. Motif politisi PSI dalam melawan anti korupsi tidak lain karena dewasa ini tidak jarang muncul berbagai konflik agama yang disebabkan intoleransi. Politisi PSI mengungkapkan salah satu contohnya ialah dengan

munculnya kaum *Tafkir* atau kaum yang mudah meng-*kafir*-kan orang-orang membuat para politisi PSI gusar. Politisi PSI meyakini hal tersebut adalah salah satu tanda yang akan merusak keberagaman. Maka tujuan politisi PSI berpartisipasi dalam politik praktis adalah membumikan keberagaman dan kesetaraan hingga tidak tercipta diskriminasi dalam bentuk apapun.

Partisipasi politik generasi milenial kini semakin marak. Generasi milenial lebih tertarik dengan aktivitas politik lapangan yang bersifat sukarelawan dan terjadi hanya pada situasi-situasi tertentu. (Matto, Martin, 2011). Berbagai motif dimiliki para politisi milenial dalam memilih untuk terlibat dalam politik praktis diantaranya melarikan diri, mencari tantangan baru dan relaksasi, harga diri, prestise, petualangan, interaksi sosial, manfaat, dan juga minat. (Komalasari dan Ganiarto, 2019).

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam mengembangkan motif masing-masing politisi yaitu melalui *affirmative action*. *Affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” (True, Parashar, & George, 2012) yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum milenial. Dasar

---

<sup>1</sup> Landasan Perjuangan PSI. Diakses dari psi.id  
Tanggal 07 Juli 2019 Pukul 13.00 WIB.

pemikiran kebijakan ini adalah agar kaum milenial dapat memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi (*influential voice*) berbagai institusi yang didominasi oleh para orang tua atau senior, maka secara kuantitatif, kaum Milenial harus mencapai apa yang disebut sebagai “*critical mass*”. Temuan penting lainnya dari studi Dahlerup (2005) diterapkan afirmasi politik ini untuk memperjuangkan kaum perempuan di parlemen, yaitu bahwa kuota minimal 30% perempuan mendapatkannya. Kondisi ini bisa analog dengan kebijakan yang membantu kaum milenial untuk mendapat tempat di parlemen yang diraih secara objektif, rasional dan sesuai etika dan aturan. Intinya “affirmative action” merujuk pada konsep “*positive discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum milenial. Dijelaskan pula oleh para advokat kebijakan affirmative action bahwa penerapan quota ini merupakan “*a transitional measure that will lay the foundation for a broader acceptance of women’s (milenial generation) representation...*” (True, Parashar, & George, 2012). Sebagaimana yang diperjuangkan oleh para politisi PSI di mana salah satunya menyoroti peran perempuan saat ini yang dinilai tidak mendapatkan hak-haknya khususnya dalam bidang pekerjaan. Idealnya para pekerja

perempuan mendapatkan fasilitas yang menunjang agar merasakan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja diantaranya: fasilitas *day care* yang dekat dengan tempat mereka bekerja, ruang laktasi kantor yang mudah ditemukan karena selama ini para ibu yang menyusui akhirnya mencari toilet untuk melakukan *pumping* tentu hal ini dinilai tidak higienis dan baik bagi kesehatan, selain itu juga dibutuhkan sarana transportasi yang aman. Sehingga perempuan bisa bekerja dengan aman dan tidak perlu khawatir dengan kondisi anaknya.

Aspek lain yang disoroti oleh para politisi PSI adalah peran *influencer* dan *YouTuber* milenial. Saat ini, *influencer* dan *YouTuber* milenial sangat banyak kita temui. Sayangnya pekerjaan yang dilakukan oleh mereka masih dianggap sekadar *passion* belaka. Padahal politisi PSI menilai aktivitas yang mereka lakukan saat ini merupakan sebuah kreativitas yang patut mendapat apresiasi dan dijadikan pekerjaan yang memiliki nilai sebagaimana pekerjaan-pekerjaan formal lainnya. Tentu ini merupakan harapan-harapan yang terus diperjuangkan, sebab untuk dapat membuat sebuah kebijakan bukan hal yang mudah. Demi terciptanya kebijakan-kebijakan yang selaras dengan apa yang diharapkan, politisi PSI memberanikan diri untuk terjun dalam

dunia politik, karena bagi mereka politik adalah aspek integral dalam kehidupan. Bukan hanya berbicara kekuasaan dan jabatan, melainkan berbicara mengenai perubahan dalam mencapai kebajikan.

Politisi PSI tentu tidak begitu saja tertarik politik begitu saja tanpa ada sebab. Sikap apolitis pun pernah dimiliki hampir seluruh politisi PSI sejak belum bergabung dalam kepartaian. Hal itu tentu tidak mudah dijalani tanpa ada sebab, latar belakang informan yang sebelumnya adalah seorang karyawan di sebuah pabrik (Yoel Yosaphat), aktivis peradilan (Ariyo Bimmo), dan *entrepreneur* (Sumardy Ma). Namun setelah melihat sosok kebanggaannya, diskusi dengan rekan yang sudah berjuang lebih dulu dalam kontestasi politik, serta melihat keadaan rakyat yang membuat mereka memiliki tekad untuk berjuang bersama menjadi agen perubahan.

Tentu tidak mudah menjadikan satu *frame* politik dengan latar belakang yang berbeda. Namun kecenderungan politik para politisi PSI muncul diantaranya karena melihat sosok Jokowi, selain itu karena cerita teman, dan ingin mendekatkan politik dengan kebajikan. Hal-hal tersebut membuat milenial sadar pentingnya politik di mana perlu adanya *role model* politisi milenial yang menduduki parlemen agar mampu mengubah aturan atau pranata yang

dianggap tidak ideal hingga pencapaian tertingginya yaitu mengubah tatanan 180 derajat. Maka untuk mengentaskan stigma yang menerpa mereka, mereka hadir sebagai pendobrak dan sebagai antitesa dari generasi sebelumnya (*baby boomer generation*).

Keinginan menguasai dan sikap otoritarian bisa juga akibat dari *will to power* dari seorang individu yang kuat dan penuh energi, atau dari kelemahan psikologis, kekacauan diri dalam batin; ketidakmampuan untuk memperoleh penghormatan dari orang lain. yang tersembunyi di balik sikap yang persis sebaliknya. Kepribadian otoritarian didefinisikan oleh konformitas yang sangat kuat, kepatuhan buta kepada sistem-sistem nilai tradisional, dengan tidak mempertanyakan kepatuhan kepada otoritas, oleh penglihatan yang disederhanakan dalam *universe* sosial dan moral yang dibagi ke dalam kategori yang jelas (baik dan buruk, salah dan benar, hitam dan putih), di mana segala-galanya dibagi secara teliti, diatur, dan dibatasi. Suatu *universe* yang lemah harus mendapatkan tempat di bawah karena dari segala segi mereka lebih rendah, dan nilai orang ditentukan oleh kriteria yang disandarkan pada kondisi sosial atau suara terbanyak (Duverger, 2010).

Berdasarkan temuan penelitian atau hasil wawancara dengan para informan,

dapat digambarkan bahwa motif politik mereka sejalan dengan *platform* atau visi partai PSI.

Dalam ranah politik di Indonesia, para politisi PSI mengklaim bahwa partainya menjadi yang pertama dalam menyuarakan anti korupsi dan anti intoleransi. Namun, gagasan yang dicanangkan dan praktik yang dilakukan PSI sebenarnya mirip dengan dua partai rujukannya di luar Indonesia yang didirikan lebih dahulu ketimbang PSI. *Aam Aadmi Party* (AAP) didirikan secara resmi pada November 2012 di India dengan target memenangkan Pemilu Legislatif Delhi 2013. Lahir dari gerakan protes India Melawan Korupsi (IAC), AAP memiliki ambisi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bahan kampanye (Abdulsalam, 2018).

### ***Political Manner dan Temperamen Politik Politisi Milenial***

Temperamen politik adalah kategori-kategori yang berlaku untuk menghasilkan individu-individu menurut perilaku dan sikap-sikapnya secara keseluruhan. Kontroversi muncul pada hakikat unsur-unsur yang menjadi komponen dari tipe psikologis partai yang berbeda-beda. Temperamen tersebut diperoleh melalui hubungan-hubungan psikososial.

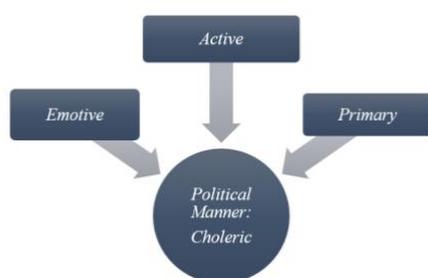
Temperamen yang muncul merupakan hasil dari *conflict of interest* masing masing politisi.

Heymans & Wierzma dalam Duverger (2010: 184) berpendapat bahwa *political manner* terdiri dari tiga komponen psikologis diantaranya *emotive*, *active*, dan *primary*. Heymans & Wierzma mengemukakan sikap yang tercermin dalam partai politik salah satunya adalah *choleric*. Sikap yang tertarik kepada pergolakan-pergolakan politik dan perjuangan untuk merebut kekuasaan; yang pertama biasanya para pemimpin yang otoritarian, dan kedua lebih merupakan orang-orang yang membentuk opini publik. Sikap yang lahir dari konflik antara prinsip realitas dan prinsip kesenangan. Akan tetapi suatu jenis kekuasaan muncul tidak timbul dari prinsip kesenangan melainkan lebih cenderung pada prinsip melihat realitas yang ada.

*Emotive*, menurut Heymans & Wierzma *emotive* berkaitan dengan perasaan emosional; agresif, asertif atau bisa juga pasif. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dielaborasi dengan teorinya, sikap PSI yang terdiri dari tiga hal termasuk ke dalam komponen *emotive*. Di mana para politisi memiliki ambisi yang cukup besar dalam menyebarkan *platform* atau ideologinya.

*Active*, berkaitan dengan sebuah ambisi keberanian dan kelantangan seseorang dalam partisipasi politik. Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagaimana yang dilakukan Grace Natalie, seorang politisi perempuan yang memiliki wajah *good looking* dan kemampuan retorika lantang. Hal ini memberikan kesan bahwa perempuan memiliki peran yang krusial dalam kehidupan politik.

*Primary*, hal ini berkaitan dengan “yang utama” di mana menempatkan sesuatu dengan eksklusif atau berbeda dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tercermin dari para politisi PSI, menjadi terdepan tentu menjadi sebuah harapannya namun mereka mengklaim bahwa mereka akan turut berbahagia ketika partai lain mengikuti perjuangannya, bukan berarti menjadi *copycat* namun hal ini menjadi suatu tanda positif, bahwa politisi PSI dapat memberi sebuah contoh yang positif bagi partai lainnya.



**Gambar 1. Political Manner dan Temperamen Politik Politisi Milenial**

Berdasarkan penjelasan *political manner* di atas, politisi PSI memiliki *Choleric* yang terdiri dari tiga komponen ini membentuk suatu sikap temperamen politik dan menjadi sikap yang khas dalam sebuah tubuh partai politik.

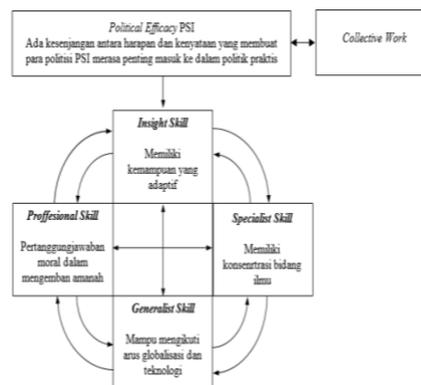
### **Orientasi Politik Generasi Milenial**

Politik, kekuasaan, identik dengan negarawan. Berpikir politik berarti berpikir hakikat “ada di balik ini semua?”. Pada dasarnya, milenial harus mampu mengindra apa yang akan terjadi minimal situasi saat ini, dan maksimal berpikir jauh ke depan. Sesungguhnya jiwa negarawan tidak terletak pada materi, sebagaimana yang diungkapkan oleh ketiga informan. Bahwa siapapun dapat menjadi negarawan, dan masing-masing kita adalah sebagai pemimpin, minimal bagi diri kita masing-masing. Maka sudah seharusnya milenial memaksimalkan perannya dalam memantaskan kapasitas ilmu, moral-spiritual, mental dan fisik kita agar sesuai dengan kapasitas pemimpin atau sosok negarawan ideal seperti yang ditunjukkan Allah SWT melalui perjalanan Thalut. Sebagaimana yang tertuang dalam Qur’an surat al-Baqarah ayat 247:

*Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab: “Bagaimana*

*Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. “Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 247).*

Ayat tersebut menunjukkan sosok milenial yang ideal, di mana sosok tersebut bukan dinilai dari harta yang dimiliki, melainkan keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Menurut informan Sumardy bahwasanya milenial itu adalah orang yang memiliki kecepatan merespons, terlebih saat ini kita berada dalam situasi di mana teknologi berkembang sangat pesat sehingga dirinya mengatakan “*we can't stop technology!*”, begitu pula dengan ungkapan informan Bimmo bahwa kecepatan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain (*multi tasking*) hanya mampu dilakukan oleh milenial jika mereka memaksimalkan perannya. Berikut digambarkan model peran dan fungsi politisi milenial:



**Gambar 2. Multi Tasking Politisi Milenial**

Salah satu proses untuk mencapai tujuan politik itu dilakukan melalui *political branding*, yakni bentuk kegiatan yang terkait dengan proses membangun kesepahaman bersama (*mutual understanding*) dan itikad baik (*good will*) dari publik internal dan publik eksternal sebuah institusi atau organisasi politik, pada prosesnya sejumlah isu dan dinamika khusus yang dikelola guna mendapatkan perhatian para pemilih (*voters*), serta memiliki orientasi pada pengumpulan dukungan seluas mungkin dari khalayak melalui berbagai saluran yang bisa dimanfaatkan, baik saluran formal maupun informal (Heryanto, 2012). Terdapat perbedaan antara para politisi dulu dengan saat ini. Partisipasi politik politisi sebelumnya (*baby boomer generation*) terbilang masih konvensional dengan melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Meski aksi ini masih juga dilakukan namun dengan

jumlah yang sedikit. Partisipasi politik dewasa ini lebih banyak dilakukan melalui internet dan media online sebagaimana yang dilakukan oleh politisi PSI. EACEA (2012) menyebut partisipasi politik generasi milenial kini memiliki sifat yang cenderung lebih individual, spontan, berdasarkan isu tertentu dan kurang terkait dengan perbedaan sosial (Juditha dan Darmawan, 2018).

Aktivitas politik yang dilakukan para politisi milenial PSI terdiri dari 1) relasi politik dengan publik (*political relations with public*), 2) paradigma politik situasional (*the grunigian politic paradigm*), 3) *hype* politik (*political hype*), 4) persuasi politik (*political persuasion*), manajemen hubungan politik (*political relationship management*), 6) manajemen reputasi politik (*politic reputation management*), 7) hubungan public politik (*political relation in public*), 8) pembangunan komunitas politik (*political communication building*).

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian persuasi politik di atas, politisi PSI memiliki cara persuasi politik diantaranya; 1) paradigma politik situasional (*the grunigian political paradigm*), 2) manajemen hubungan politik (*political relationship management*), hubungan

publik politik (*political relation in public*), dan pembangunan komunitas politik (*political community building*).

Paradigma politik Grunigian (*the Grunigian political paradigm*), pendekatan ini banyak dipraktikkan di Eropa, yakni bagaimana menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara organisasi dan publiknya. Menurut Grunig dan Hunt (1984), tindakan pokoknya adalah pada bagaimana mengembangkan *mutual benefit* (keuntungan bersama). Prasyarat utamanya harus ada *two-way symmetrical communication*.

Manajemen hubungan politik (*political relationship management*), tujuan pendekatan ini adalah memberi tekanan dan lobi dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Pendekatan ini memaksimalkan ide dan kontak terhadap individu-individu aktivis organisasi yang menjadi bagian dari kebijakan komunitas. Hubungan publik politik (*political relation in public*), merupakan perspektif yang banyak digunakan di Eropa, yang fokusnya adalah "*working in public*" dengan cara memberi perhatian lebih pada penanganan isu-isu HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan berbicara (*Freedom of Speech*).

Pembangunan komunitas politik (*political community building*), pendekatan

ini lazimnya digunakan di *The Mid West America*. Fokusnya pada upaya menciptakan dan mengatur rasa memiliki komunitas (*sense of community*). Pendekatan komunitas ini dianggap cocok, terutama untuk mengurangi konflik. Menciptakan harmoni dalam komunitas, sebagaimana yang dilakukan oleh politisi PSI dalam menyampaikan opini di depan khalayak. Di hadapan publik, semua politisi PSI diperkenankan untuk menyampaikan gagasannya, tidak hanya orang tertentu saja. Sehingga mereka mengklaim, metode ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggungjawab seluruh anggota dalam setiap partai politiknya.

## SIMPULAN

Keterlibatan politisi milenial PSI dalam politik praktis adalah sebuah bentuk aktualisasi diri dengan turut serta memperjuangkan anti korupsi dan anti intoleransi. Berpegang pada semangat *Bhineka Tunggal Ika* yaitu: transparan, jujur, pantang menyerah, mendobrak pakem-pakem lama yang dianggap usang, dan bersaing menurut kompetensi sehingga mampu menunjukkan sikap bangga berpolitik. Politisi milenial PSI berusaha hadir dengan semangat dan gaya politik baru sebagai pendobrak dan antitesa dari generasi sebelumnya (*baby boomer*).

Tujuannya adalah agar tercipta Undang-Undang, aturan, dan pranata yang dapat mengkoordinasikan aspirasi masyarakat khususnya untuk generasi milenial, tercipta *good image* anggota dewan atau DPRD serta tercipta kesetaraan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Pengalaman politik selama lima tahun, membawa para politisi milenial ini memerlukan upaya khusus dalam membangun relasi politik dengan milenial. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah, namun mereka dapat belajar melalui kesalahan-kesalahan politik yang selama ini sering terjadi di Indonesia, atau dengan *benchmarking* pengalaman orang lain. Kuncinya adalah adaptasi, karena dengan adaptasi politisi dapat mengasah kemampuan dalam merespons suatu fakta baru. Untuk itu, dibutuhkan adalah adanya *insight skill, specialist skill, generalist skill*. Untuk mencapai *professional skill* politisi milenial PSI menggunakan pendekatan dan dalam *technology savvy, enthusiasm, blended learning, passionable, self-development*, dan *push the limit*.

Sebagai saran diperlukan kajian lebih lanjut tentang tipikasi politik generasi milenial yang lebih berkualitas dengan menggunakan teknologi komunikasi/ digital/ media sosial untuk meng-*counter*

kecepatan penyebaran informasi tentang makna, motif, dan pengalaman politik generasi milenial. Disamping itu perlu penelitian lebih lanjut dari perspektif lain baik dari segi tingkat kritisi, kesadaran dan terhadap keilmuan lainnya. Sehingga memperkaya khazanah ilmu komunikasi politik yang berkaitan dengan generasi milenial. Secara praktis, disarankan agar badan publik atau negara memfasilitasi peran dan fungsi milenial dalam segi pendidikan politik yang mengandung edukasi dan kaya akan literasi komunikasi politik. Diperlukan adanya edukasi yang luas tentang informasi politik dan perkembangan politik generasi milenial baik dalam partai maupun dalam bidang akademik secara masif dan berkesinambungan. Sehingga dengan perlahan mampu mengentaskan pemikiran apolitis pada generasi milenial.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdulsalam, Husein. (2018). Tirto.id; *Hai Bro-Sis PSI, Ada yang Bisa Dipelajari dari Perancis dan India*. Diakses Tanggal 20 Mei 2019 Pukul 05.20 WIB.

Ardianto, Elvinaro. (2010). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis.

Cappella, J. N., Kim, H. S., & Albarracín, D. (2015). Selection and Transmission Processes for Information in the Emerging Media Environment: Psychological Motives and Message Characteristics. *Media Psychology*, 18(3), 396–424. doi:10.1080/15213269.2014.941112.

Dahlerup, D., & Freidenvall, L. (2005). "Quota as a 'Fast Track' to Equal Representation for Women". *International Feminist Journal of Politics*. 7(1): 26-48.

Dewi, Evie Ariadne Shinta. (2017). *Political Communication, and Institutionalization, of Democracy*. MediaTor, Vol 10 (2), Desember 2017, 133-142.

Duverger, Maurice. (2010). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo Persada.

Elisabeth, Adriana. (2016). *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015 – 2025)*. LIPI. Buku Obor.

Fosse, Ethan. (2015). Cultural Continuity and the Rise of the Millennials: Generational Trends in Politics, Religion and Economic Values (Kelangsungan Budaya dan Bangkitnya Milenium: Tren Generasi dalam Politik, Agama, dan Nilai-Nilai Ekonomi). *ProQuest Dissertations and Theses*, 215.

Gilman, Hollie Russon. Stokes, Elizabeth. (2014). The Civic and Political Participation of Millennials (Kewarganegaraan dan Partisipasi Politik Milenial). *Millennials Rising, New Amerika*, 57-60.

Hanafi, Ridho Imawan. (2018). Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Vol.15, No.2, Desember 2018, p. 197-213.

Heryanto, Gun Gun. Rumar, Shulhan. (2013). *Komunikasi Politik sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Indah Budiati, SST, M.Si Dr. Yuni Susianto, S.Si, M.Si Dr. Windhiarso Ponco Adi P, S.Si, M.Eng Sofaria Ayuni, S.Si, MM Henri Asri Reagan, SST, M.Si. Putri Larasaty, SST Nia Setiyawati, SST Aprilia Ira Pratiwi, SST Valent Gigih Saputri, SST. (2018). Statistik Gender Tematik. *Profil Generasi Milenial Indonesia*. Kerjasama. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik.

Juditha, Christiany. Darmawan, Eko. (2018). Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Vol. 22 (2), Desember 2018: 91-105.

Karus Lucius. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. (2019), Jumlah Caleg Generasi Milenial, *parlemenindonesia.org*, diakses tgl 07 Juli 2019.

Komalasari, Farida. Ganiarto, Eko. (2019). Determinant Factors Of Indonesian Millennials Revisit Intention. *Firm Journal of Management Studies*. Vol. 4 No. 2. 177-199.

Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomenologi (Fenomena Pengemis Kota Bandung)*. Bandung: Widya Padjajaran.

Lawson, D & J Garrod. (2002). *The Complete A-Z Sociology Handbook*. Penguin: Boston

Matto, Elizabeth C. Martin, Kimberly D. (2011). Passing the Torch: Millennials' Attitudes Towards Civic and Political Engagement (Melewati Obor: Sikap

Milenial terhadap Warga Sipil dan Keterlibatan Politik). *Center of American Progress*.

McNamee, Stephen J. (2004). *The Meritocracy Myth*. New York: Rowman & Littlefield Publishers.

Nimmo, Dan. (1989). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remadja Karya.

Papacharissi, Z., & Rubin, A. M. (2000). Predictors of Internet use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 44(2), 175–196.  
doi:10.1207/s15506878jobem4402\_2.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taylor, Paul Keeter, Scott. (2010). Millennials: A Portrait of Generation Next (Milenial: Potret Generasi Selanjutnya). *Pew Research Center*, 141.

The Charles F. Kettering Foundation. (2001). Students Talk Politics. *CIRCLE: (The Center for Information & Research on Civic Learning & Engagement)*, 1-52.

Utomo, William Putra. 2019, Memahami Perilaku Millennial Indonesia. *IDN Research Institute*, 94, <https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-millennial-report-2019-by-idn-times.pdf>.

Young, Michael. (2001). *Down with Meritocracy*. The Guardian.

----- (1958). *The Rise of Meritocracy*. McGraw Hill: London.